

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Todaro (2006) dalam (Sari I., 2017) Pembangunan ekonomi daerah merupakan proses kenaikan pendapatan total serta pendapatan perkapita guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, adil dan makmur. Dengan adanya kondisi ekonomi masyarakat yang cukup serta dapat memenuhi kebutuhan, hal tersebutlah yang dapat dikatakan sejahtera (Larasati & Setya Riko, 2022). Pada intinya, suatu bangsa di negara manapun melaksanakan pembangunan ekonomi guna mengupayakan peningkatan taraf hidup maupun kesejahteraan rakyatnya dengan mengelola segala sumber daya yang ada dengan membentuk kesepakatan kerjasama antar pemerintah daerah dan sektor-sektor swasta guna memicu perkembangan kegiatan ekonomi. (Todaro & Smith, 2006)

Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang merupakan salah satu tujuan atas keberhasilan dari pembangunan ekonomi. Menurut Sadono Sukirno dalam (Sari I., 2017) definisi pembangunan dan pertumbuhan merupakan dua hal yang berbeda, dimana pertumbuhan ekonomi sebagai tolak ukur gambaran kondisi perkembangan suatu perekonomian dalam periode tertentu terhadap tahun sebelumnya, tingkat pertumbuhan daerah itu sendiri atau Produk Domestik Bruto Nasional (PDRB) merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang dapat menyebabkan pendapatan riil perkapita penduduk di suatu negara terus meningkat dalam jangka panjang. Karena hal itu, pertumbuhan

ekonomi dalam jangka panjang merupakan salah satu indikator yang perlu dicapai dalam pembangunan ekonomi.

Namun nyatanya sejauh ini baru terbukti Pembangunan hanya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi, bukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang pesat belum diimbangi dengan pemerataan distribusi hasil pembangunannya. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi dianggap berhasil jika suatu daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pemerataan yang lebih baik dan lebih adil. Selain untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya, tujuan sentral pembangunan ekonomi juga harus diselaraskan dengan pengentasan kemiskinan, pengangguran dan perbedaan pendapatan antar daerah dan sektor (Fitriyah & Rachmawati, 2013).

Seperti yang telah diungkapkan (Sari I., 2017) diharapkan daerah dapat mengetahui potensi basis ekonomi yang ada, karena sektor basis ekonomi merupakan sektor yang paling besar pengaruhnya terhadap keadaan ekonomi, sektor-sektor tersebut untuk memastikan terciptanya kemandirian masing-masing daerah dan agar perbedaan pendapatan antara negara bagian dan kota serta antar daerah dapat dikurangi.

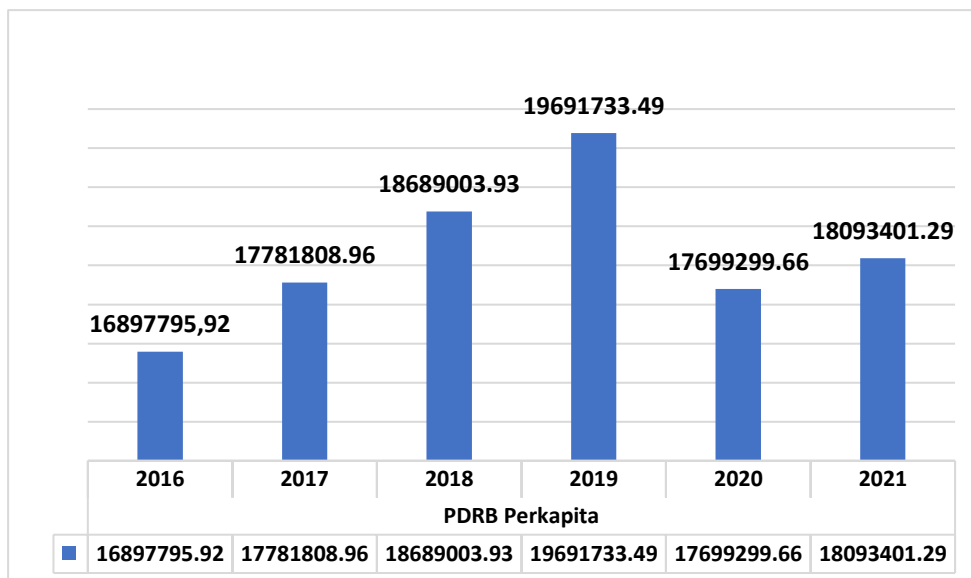
Pemerintah mengesahkan UU No. 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, artinya terdapat pembagian tanggung jawab yang harus dilaksanakan untuk menciptakan kemandirian dan mengelola potensi ekonomi yang ada serta mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi daerah. Peralihan kekuasaan ini lebih dikenal dengan istilah desentralisasi, yang berimplikasi pada munculnya

daerah-daerah otonom. Dengan otonomi daerah, khususnya kabupaten/kota diharapkan pembangunan daerah lebih optimal dengan mendorong setiap daerah/kota untuk bekerjasama secara regional untuk meningkatkan daya saing dalam ekonomi global.

Sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk kawasan kerjasama antar daerah agar terwujudnya pemerataan pembangunan serta peningkatan perekonomian antar daerah termasuk pengurangan disparitas pendapatan antar daerah, hal ini telah diatur didalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruan. Terdapat 3 kawasan kerjasama antar kabupaten/kota yang terbentuk di Provinsi Jawa Tengah, yakni salah satunya Kawasan Bregas.

Kawasan Bregas adalah salah satu kawasan kerjasama yang terdiri dari Kabupaten/Kota terletak di Provinsi Jawa Tengah, diantaranya Kabupaten Brebes, Kota Tegal dan Kabupaten Tegal (Slawi), pada era Mataraman Islam kawasan ini adalah wilayah Eks Karesidenan Pekalongan yang menjadi wilayah administratif pusat. Tujuan dibentuknya kawasan Bregas adalah untuk melakukan regionalisasi dengan menekankan kemandirian kabupaten/kota sebagai upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan daya tarik tersendiri sebagai wilayah yang mempunyai potensi untuk kegiatan perdagangan, investasi maupun wisata. Kawasan Bregas yang diharapkan menjadi daerah yang mandiri ini tidak terlepas dari berbagai permasalahan ekonomi, termasuk persoalan ketimpangan/disparitas pendapatan antar kabupaten/kota yang terjadi.

**Gambar 1. 1 Rata-rata PDRB Per Kapita (dalam Milyar Rupiah)  
Kabupaten/Kota Di Kawasan Bregas Tahun 2016-2021**



Sumber : BPS Jawa Tengah 2023, data diolah.

Bregas merupakan salah satu kawasan andalan yang terdapat di Jawa Tengah, karena kawasan ini dijadikan sebagai pusat penggerak pertumbuhan perekonomian wilayah. PDRB per kapita Kawasan Bregas mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dari sekitar 16.897.795,92 milyar rupiah pada tahun 2016, menjadi 19.691.773,49 milyar rupiah pada tahun 2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 serta 2021. Hal ini dikarenakan adanya kontraksi ekonomi yang dipengaruhi oleh pelemahan sektor-sektor ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19.

Dapat dilihat berdasarkan grafik diatas, PDRB per kapita pada Kawasan Bregas mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan dan PDRB per kapita masih belum merata disetiap kabupaten/kota pada kawasan ini. Perbedaan PDRB perkapita antar kabupaten/kota di wilayah ini menyebabkan kemungkinan besar terjadinya disparitas pendapatan antar wilayah kabupaten/kota dalam kawasan ini. Disparitas pendapatan antar wilayah ini merupakan sebuah fenomena yang krusial

dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, dengan memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk membentuk kemandirian secara ekonomi dan memperoleh kewenangan seluas-luasnya dalam mengelola potensi ekonomi yang ada sehingga memungkinkan tercapainya pembangunan ekonomi daerah yang merata. Maka diperlukan penelitian untuk mengetahui potensi ekonomi apa saja yang dimiliki Kawasan Bregas serta bagaimana perannya dalam mempengaruhi disparitas pendapatan yang terjadi di Kawasan Bregas Jawa Tengah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam upaya mendorong pembangunan ekonomi daerah menuju pertumbuhan dan pemerataan ekonomi jangka panjang, setiap daerah mempunyai hak dan kewenangan yang sama untuk mengatur urusan daerahnya sendiri dan dapat mewujudkan kemandirian dengan memanfaatkan potensi ekonomi yang dimiliki setiap daerah, termasuk kawasan Bregas. Tentunya dengan mengetahui potensi ekonomi basis yang ada dan memahami peran masing-masing sektor ekonomi basis dalam pembangunan ekonomi yang tidak merata, dapat bekerja lebih baik di masa depan dengan menentukan kebijakan pengembangan potensi ekonomi yang tepat sesuai dengan perannya dalam ketimpangan pendapatan di kawasan Bregas dan diharapkan mampu mengurangi ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Kawasan Bregas Jawa Tengah.

Dengan adanya gap tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana potensial sektor di Kawasan Bregas Jawa Tengah?
2. Bagaimana tingkat disparitas pendapatan di Kawasan Bregas Jawa Tengah?
3. Bagaimana pengaruh sektor potensial terhadap disparitas pendapatan di Kawasan Bregas Jawa Tengah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui sektor potensial yang menjadi sektor basis di Kawasan Bregas Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat disparitas pendapatan di Kawasan Bregas Jawa Tengah.
3. Untuk mengidentifikasi peran sektor potensial terhadap disparitas pendapatan di Kawasan Bregas Jawa Tengah.

### **1.4 Ruang Lingkup**

Objek penelitian dari topik ini meliputi Kawasan Bregas dengan buku data yang digunakan yakni data tahun 2016-2021, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari BPS (Badan Pusat Statistik), dan bersifat kuantitatif. Ditekankan bahwa penelitian ini akan membahas sektor ekonomi basis dan non-basis, tipologi klasifikasi wilayah serta derajat disparitas pendapatan antar wilayah/kabupaten. Untuk menghindari ruang lingkup pembahasan yang terlalu luas dan untuk mendapatkan hasil pembahasan yang rinci dan terfokus, maka ditekankan bahwa penelitian ini akan menganalisis sektor ekonomi basis dan non-basis, tingkat disparitas pendapatan, pola pertumbuhan ekonomi dengan tipologi

kelas daerah, serta peranan sektor ekonomi basis terhadap disparitas pendapatan di Kawasan Bregas Jawa Tengah.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca/mahasiswa serta bagi pemerintah dapat menjadi acuan dan saran untuk mengambil kebijakan dalam penyusunan perencanaan daerah pada tahap selanjutnya bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya tiap kabupaten/kota di Kawasan Bregas.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan menyajikan data dalam bentuk angka seperti laju pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, Produk Domestik Bruto Regional, jumlah penduduk, sektor-sektor ekonomi dan data lain yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan antar wilayah di Kawasan Bregas Provinsi Jawa Tengah. Metode penelitian kuantitatif ini menekankan pada pengujian teori dan diukur serta dianalisis dengan menggunakan variabel penelitian berupa data statistik.